

MONOPOLI JALUR LOGISTIK: PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA ANGKUTAN BATU BARA DI LINTASAN NASIONAL PROVINSI JAMBI

Cindy Wasty Simangunsong¹, Helen Pandiangan², Yesica Sridewi Silitonga³, Fadilla

Ulfah⁴, Ahmad Soleh⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi

Email : cindywastysimangunsong@gmail.com¹, helenpandiangan30@gmail.com², yesicasridewisilitonga@gmail.com³, fadillaulfah@unja.ac.id⁴, ahmad.soleh@unja.ac.id⁵

Abstrak

Studi ini menganalisis kompleksitas aktivitas logistik pertambangan batubara di Provinsi Jambi, yang memicu eksternalitas negatif pada infrastruktur jalan dan stabilitas sosial-ekonomi. Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Jambi sebesar Rp 50 miliar per tahun dan menyediakan lapangan kerja, terdapat paradoks dalam tata kelolanya yang telah menyebabkan kerusakan jalan yang masif sejak tahun 2009 karena beban kendaraan yang jauh melebihi kapasitas jalan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi ini menyoroti indikasi persaingan usaha yang tidak adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana sektor pertambangan menikmati fasilitas publik tanpa kompensasi yang sebanding atas kerusakan, sehingga merugikan sektor ekonomi lainnya. Analisis menggunakan prinsip aturan akal sehat menunjukkan perlunya penguatan peran KPPU (Komisi Pengawasan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pengembangan jalur logistik khusus untuk memisahkan transportasi industri dari akses publik. Hasil studi merekomendasikan strategi manajemen terpadu yang memprioritaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk melindungi hak mobilitas masyarakat dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Pertambangan Batubara, Eksternalitas Negatif, Infrastruktur Jalan, Persaingan Usaha Tidak Adil, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Provinsi Jambi.

Abstract

This study analyzes the complexity of coal mining logistics activities in Jambi Province, which trigger negative externalities on road infrastructure and socio-economic stability. Although the mining sector contributes significantly to the Jambi Regional Budget (APBD) of IDR 50 billion per year and provides employment, there is a paradox in its governance that has caused massive road damage since 2009 due to vehicle loads far exceeding road capacity. Using descriptive qualitative methods, this study highlights indications of unfair business competition based on Law Number 5 of 1999, where the mining sector enjoys public facilities without comparable compensation for damage, thus harming other economic sectors. Analysis using the rule of reason principle indicates the need to strengthen the role of the KPPU (Commission

for the Supervision of Public Works and Public Housing) and the development of special logistics lanes to separate industrial transportation from public access. The results of the study recommend an integrated management strategy that prioritizes the principles of transparency and accountability to protect the community's right to mobility and ensure environmental and economic sustainability in Jambi Province.

Keywords: *Coal Mining, Negative Externalities, Road Infrastructure, Unfair Business Competition, Law No. 5 of 1999, Jambi Province.*

PENDAHULUAN

Keberadaan kekayaan alam yang melimpah di suatu kawasan tidak hanya dianggap sebagai sumber pendapatan daerah tetapi juga menuntut manajemen yang efektif, berkelanjutan, dan peduli terhadap aspek lingkungan. Kolaborasi dan keselarasan antara semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatannya, baik pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting untuk menjamin keberlangsungan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya tambang batubara menurut Subhan, (2015). Batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang terdapat di wilayah-wilayah, dengan pengelolaan yang ditujukan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tambang batu bara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara maksimal, efisien, transparan,

berkelanjutan, serta memperhatikan lingkungan menurut (Syarif, 2020).

Selain menjadi sumber daya energi yang sangat penting, menurut Suryani & Yetti (2024) batubara adalah salah satu bahan galian strategis. Salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di dunia adalah Indonesia. Karena penemuan tambang baru, tambang batu bara berkembang dengan cepat. Sebagai negara pengekspor batu bara tertinggi di dunia, Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar. Untuk menggantikan potensi minyak dan gas bumi yang semakin menipis, batubara mungkin menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan di masa depan. Pengembangan bisnis pertambangan batubara secara ekonomis telah menghasilkan manfaat yang signifikan, baik dalam memenuhi permintaan domestik maupun menghasilkan devisa. Selain itu, eksploitasi besar-besaran batubara secara ekologis sangat memprihatinkan karena memiliki efek yang mengancam kelestarian

fungsi lingkungan hidup dan menghambat kemajuan lingkungan yang berkelanjutan.

Di balik dukungan finansial untuk daerah, batubara juga menimbulkan isu yang rumit di Provinsi Jambi, terutama terkait pengangkutannya dari lokasi tambang menuju tempat penyimpanan. Kendaraan pengangkut batubara dengan jumlah yang sangat banyak bergerak dari daerah tambang di sejumlah Kabupaten, terutama yang berada di kawasan Barat Jambi, menuju pelabuhan di bagian Timur Jambi. Aktivitas truk ini yang melewati jalan umum telah menyebabkan kerusakan pada ruas jalan yang dilalui. Jalan-jalan di Provinsi Jambi dengan kapasitas mendukung 8 ton tidak dapat menahan beban kendaraan pengangkut batubara yang bisa mencapai belasan hingga puluhan ton.

Sejak tahun 2009, adanya masalah jalan akibat pengangkutan batubara ini sudah terjadi. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

1. Kerusakan jalan karena beban yang berlebihan dan tidak sesuai dengan klasifikasi jalan yang berlaku di Jambi.
2. Kerugian finansial untuk pemerintah daerah yang harus mengeluarkan sejumlah besar dana untuk

memperbaiki kondisi jalan yang rusak.

3. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas ketika pengendara mencoba menghindari jalan yang berlubang.
4. Terjadinya penurunan fondasi rumah penduduk beberapa meter disebabkan oleh truk batubara yang membawa muatan melebihi kapasitas.

Peran Provinsi Jambi sangat penting karena lokasinya yang strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya, terutama dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Selain gas bumi, minyak bumi, dan timah putih, batu bara adalah salah satu potensi kekayaan alam Jambi. Diperkirakan ada 18 juta ton batu bara di Jambi yang merupakan batu bara kelas kalori sedang yang sesuai untuk digunakan sebagai sumber energi. Kabupaten Muara Bungo memiliki cadangan yang paling banyak. Salah satu produk tambang terbesar di Jambi terletak di beberapa kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Sarolangun
2. Kabupaten Batang Hari
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Kabupaten Tebo
5. Kabupaten Bungo
6. Kabupaten Muaro Jambi
7. Kabupaten Merangin

Namun, kemajuan yang cepat tidak sebanding dengan tindakan yang buruk dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang yang efektif menghasilkan banyak konsekuensi negatif. Dampak pengelolaan tambang yang salah dapat mengganggu stabilitas ekosistem dalam beberapa tahun lagi, meskipun ini mungkin tidak terlalu terasa saat ini. Untuk menghentikan pengelolaan tambang yang salah, tindakan segera harus diambil. mulai dari sosialisasi hingga implementasi dalam dunia nyata. Dengan demikian, keseimbangan alam diharapkan dapat kembali, tidak hanya kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan, tetapi juga sektor ekonomi. Dengan reputasinya sebagai salah satu daerah penghasil tambang batubara terbesar di Sumatera, Provinsi Jambi telah memberikan bantuan yang signifikan kepada pemerintah daerah, terutama untuk APBD provinsi jambi dengan kontribusi sebesar 50 miliar rupiah setiap tahunnya. Bagi masyarakat setempat, tentunya manfaat dari perusahaan tambang ini adalah bahwa mereka dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi jambi (Citra Darminto, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi pengelolaan pertambangan yang terintegrasi yang dapat mempercepat pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan di Provinsi Jambi yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas logistik batu bara. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara yang melebihi kapasitas beban dapat menyebabkan eksternalitas negatif yang menghambat efisiensi sektor ekonomi lainnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang disebabkan oleh perbedaan beban biaya infrastruktur antara sektor pertambangan dan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi praktis untuk menjaga produktivitas daerah, melindungi hak mobilitas, dan menciptakan bisnis yang sehat di Provinsi Jambi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan studi dokumentasi digital untuk membedah realitas kompleks terkait dampak aktivitas pertambangan batubara terhadap infrastruktur jalan di Provinsi Jambi. Mengingat adanya kontradiksi

antara kontribusi ekonomi batubara terhadap APBD sebesar Rp50 miliar per tahun dengan kerugian ekologis serta kerusakan jalan akibat beban muatan yang melebihi kapasitas (tonase), maka pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi sumber primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh secara sistematis melalui studi dokumentasi terhadap jurnal-jurnal ilmiah terdahulu, regulasi pemerintah, serta pemantauan berita terkini untuk memetakan kronologi permasalahan jalan sejak tahun 2009. Sementara itu, data primer didukung oleh informasi dari masyarakat terdampak dan pengguna jalan guna memvalidasi dampak riil di lapangan, seperti kecelakaan lalu lintas dan kerusakan fondasi tempat tinggal warga (Navarin Karim, 2023).

Metode penelitian kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini sangat sesuai untuk mengeksplorasi fenomena kompleks, seperti alasan mengapa pengusaha tambang tidak terlibat dalam pembangunan jalan tertentu dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan pengalihan jalur transportasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif yang lebih dalam dari berbagai faktor, termasuk pengusaha, pemerintah, dan masyarakat lokal. Fleksibilitas metode

kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan terbuka dan mengeksplorasi berbagai dimensi masalah, sehingga dapat mengidentifikasi motif dan dinamika di balik kolaborasi yang tidak berhasil. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan membantu merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterlibatan pengusaha tambang dalam pembangunan berkelanjutan serta memahami realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat (Angkutan et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dialektika Potensi Ekonomi dan Realitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Provinsi Jambi merupakan salah satu entitas wilayah di Indonesia yang memiliki kedudukan strategis karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya pada sektor pertambangan batu bara. Berdasarkan data estimasi, terdapat cadangan sebesar 18 juta ton batu bara dengan klasifikasi kalori sedang yang tersebar secara geografis di berbagai kabupaten, meliputi Muara Bungo, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Muaro Jambi, hingga Merangin. Secara makroekonomi,

eksploitasi komoditas ini memberikan kontribusi finansial yang signifikan melalui sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi yang mencapai Rp50 miliar setiap tahunnya. Selain itu, sektor ini berperan dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, yang secara teoritis berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Citra Darminto (2021) memberikan data mengenai manfaat ekonomi perusahaan tambang bagi masyarakat setempat, seperti penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun, keberadaan kekayaan alam yang melimpah ini menciptakan paradoks dalam manajemen dan tata kelolanya. Meskipun secara yuridis pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat melalui prinsip efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan, realita di lapangan menunjukkan adanya diskoneksi antara kemajuan industri dengan kualitas pengelolaan lingkungan (Kevin hasudungan rist samosir, 2017). Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sering kali tidak berjalan secara sinkron, sehingga produktivitas ekonomi yang dihasilkan tidak dibarengi dengan

mitigasi dampak negatif yang memadai. Menurut Suryani dan Yetti (2024), menjelaskan bahwa posisi strategis baru bara sebagai bahan galian penting dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kota Jambi. Kurangnya sosialisasi mengenai tata kelola tambang yang efektif mengakibatkan munculnya tindakan tidak bertanggung jawab dari sejumlah pihak, yang pada akhirnya mengancam stabilitas ekosistem dan keseimbangan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

B. Analisis Eksternalitas Negatif: Krisis Infrastruktur dan Degradasi Sosial

Aktivitas logistik batu bara di Provinsi Jambi telah memicu eksternalitas negatif yang sangat kompleks, terutama akibat penggunaan jalan umum sebagai jalur utama pengangkutan dari lokasi pertambangan menuju pelabuhan. Fenomena ini berakar pada ketidaksesuaian beban kendaraan dengan spesifikasi teknis infrastruktur jalan. Jalan-jalan nasional dan provinsi di Jambi dirancang dengan kapasitas daya dukung maksimal 8 ton, namun dalam implementasinya, jalur tersebut dipaksa menahan beban armada truk batu bara yang mencapai belasan

hingga puluhan ton. Ketimpangan antara beban aktual dan kapasitas jalan ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan yang masif dan berkelanjutan sejak tahun 2009. Akibatnya, pemerintah daerah harus menanggung kerugian finansial yang besar karena harus mengalokasikan dana pemeliharaan jalan secara berulang, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan lainnya.

Dampak dari kegagalan manajemen infrastruktur ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merambah pada aspek keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Kerusakan jalan yang parah, seperti timbulnya lubang-lubang dalam, secara linear meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan umum. Selain itu, masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur lintasan logistik menghadapi dampak fisik berupa kerusakan properti (Boby Indra Purnawan, 2025). Getaran mekanis serta beban muatan yang ekstrem dari ribuan armada truk setiap harinya telah menyebabkan penurunan fondasi rumah penduduk secara signifikan. Secara ekologis, eksploitasi besar-besaran yang tidak diikuti dengan sistem pengangkutan yang terintegrasi telah mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat pencapaian target

pembangunan berkelanjutan di wilayah Provinsi Jambi.

C. Tinjauan Yuridis dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, dinamika angkutan batu bara di Jambi dapat dianalisis melalui kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat indikasi terjadinya ketidakadilan dalam distribusi beban biaya infrastruktur yang memicu iklim usaha tidak sehat. Sektor pertambangan secara implisit menikmati penggunaan fasilitas publik tanpa memberikan kompensasi yang sebanding dengan kerusakan yang dihasilkan, sementara sektor ekonomi lainnya justru mengalami hambatan efisiensi akibat kemacetan dan kerusakan jalan yang dipicu oleh logistik tambang tersebut. Hal ini menciptakan disparitas biaya operasional antar pelaku usaha yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi.

Penegakan hukum terhadap fenomena ini masih menemui kendala pada aspek konsistensi dan penguatan kelembagaan, khususnya peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Analisis terhadap permasalahan ini menggunakan prinsip rule of reason, yakni mengkaji apakah tindakan pelaku usaha dalam memanfaatkan jalur logistik umum telah melampaui batas kewajaran sehingga menimbulkan distorsi pasar dan kerugian publik. Fakta bahwa pengusaha tambang sering kali tidak terlibat secara proaktif dalam pembangunan jalur khusus menunjukkan adanya kegagalan dalam internalisasi biaya sosial ke dalam biaya produksi perusahaan. Tanpa adanya sanksi hukum yang tegas dan berkelanjutan, praktik ini akan terus membebani ekonomi daerah dan menghambat terciptanya iklim bisnis yang sehat dan kompetitif (Roida Nababan, 2020).

D. Evaluasi Kebijakan dan Urgensi Strategi Pengelolaan Terintegrasi

Keberhasilan regulasi pemerintah dalam menata transportasi batu bara sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi lintas sektoral. Hingga saat ini, berbagai kebijakan yang dikeluarkan sering kali belum memberikan solusi jangka panjang karena kurangnya keterlibatan stakeholder secara menyeluruh. Studi menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami alasan di balik kegagalan kolaborasi antara pengusaha tambang dengan pemerintah dalam pengadaan

infrastruktur khusus. Tanpa adanya konsensus yang kuat, kebijakan jam operasional atau pengalihan jalur hanya akan bersifat paliatif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan utama.

Sebagai langkah strategis, diperlukan pengembangan sistem pengelolaan pertambangan yang terintegrasi dengan pembangunan jalan khusus batu bara guna memisahkan jalur logistik industri dari akses mobilitas publik. Pembangunan jalur khusus merupakan solusi imperatif untuk melindungi hak mobilitas masyarakat, mengurangi biaya pemeliharaan jalan negara, dan menjamin produktivitas daerah tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan tambang di masa depan harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kemajuan ekonomi yang dicapai tidak mengorbankan keseimbangan alam dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Hanya melalui sinergi yang berkelanjutan antara aspek ekonomi, hukum, dan lingkungan, potensi besar batu bara di Provinsi Jambi dapat benar-benar ditransformasikan menjadi kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh lapisan masyarakat (Rahman Nauli, n.d.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Provinsi Jambi kaya akan sumber daya alam, khususnya batu bara, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan batu bara terhadap APBD sebesar Rp50 miliar per tahun tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi akibat pengangkutan barang yang melebihi kapasitas. Jalan-jalan yang dirancang untuk menampung beban maksimum 8 ton sering kali dipaksakan untuk menanggung beban truk pengangkut batu bara yang mencapai belasan hingga puluhan ton. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan yang serius pada infrastruktur tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selain itu, ketidakterlibatan pengusaha tambang dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan sektor lain dan masyarakat umum. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi antara

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat mendesak untuk meminimalkan dampak negatif serta mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari aktivitas pertambangan.

Saran

Untuk menanggapi isu-isu yang diidentifikasi dalam penelitian ini, beberapa langkah strategis perlu diambil.

1. Pemerintah Provinsi Jambi harus segera menciptakan kebijakan pengelolaan sumber daya tambang yang lebih terintegrasi, sehingga dapat mengatasi kerusakan infrastruktur dengan membangun jalur transportasi khusus untuk angkutan batu bara. Jalur ini akan memisahkan lalu lintas industri dari akses publik, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada infrastruktur jalan yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pengusaha tambang perlu didorong untuk lebih proaktif dalam berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang diperlukan, mungkin melalui mekanisme compensatory atau pajak yang lebih adil.
2. Memperkuat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan implementasi kebijakan sangat penting. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang relevan dan merasa memiliki keputusan yang diambil. Upaya ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

3. Penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap praktik asumsi beban biaya infrastruktur yang tidak adil harus ditegakkan. Pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat agar dapat mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sektor pertambangan harus subject kepada audit yang lebih ketat, untuk memastikan bahwa mereka memasukkan biaya sosial dalam proses produksi mereka.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan yang diusulkan, serta mengeksplorasi praktik terbaik dalam

pengelolaan sumber daya tambang di daerah lain sebagai perbandingan. Hanya dengan kerja sama yang erat antara semua pihak, kita dapat menciptakan suatu model pengelolaan sumber daya yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan, demi kepentingan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkutan, D., Dalam, J., Terhadap, P., Lalu, P., Angkutan, L., Di, B., Jambi, K., Jambi, P., Sasmita, Y., Jambi, A. K., Program, J., Perpolisian, S. P., Pamong, T., Skripsi, P., Syaefullah, :, Sos, S., & Si, M. (n.d.). *Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Lalu Lintas*.
- Boby Indra Purnawan, H. H. H. (2025). *Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota Terhadap Stabilitas Makroekonomi Kota Jambi dalam Pembangunan Berkelanjutan*.
- Citra Darminto, H. A. B. (2021). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara*. 6.
- Kevin hasudungan rist samosir. (2017). *Kevin Hasudungan Rist Samosir*.
- Navarin Karim, W. R. C. S. P. (2023). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10561491>

Rahman Nauli. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengangkutan Batu Bara di Kota Jambi Provinsi Jambi.*

Roida Nababan, J. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Subhan, A. (2015). *Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Ditinjau dari Perspektif Good Governance. 1(1).*

Suryani, N., & Yetti, H. (2024). *Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Kota Jambi. 7(1).*
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Syarif, A. (2020). *Pengelolaan Pertambangan Batu Bara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi.*